

## 1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi di Kabupaten Sabu Raijua yang merupakan Kabupaten Non IHK mengikuti perkembangan inflasi di Kota IHK terdekat yaitu Kota Kupang dan kota Waingapu. Pada Januari 2024, Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,98% (mtm), dan Kota Waingapu inflasinya sebesar 0,12% (mtm). Tingkat inflasi di 2 kota besar penyangga perekonomian Kabupaten Sabu Raijua ini lebih rendah dibanding inflasi di Januari tahun 2023. Sementara itu di bulan Februari, kota Waingapu mengalami inflasi month to month sebesar 0,65% lebih tinggi dibanding inflasi bulan Januari 2024, sedangkan Kota Kupang di bulan Februari mengalami inflasi sebesar 0,32% atau lebih rendah dibanding inflasi pada bulan Januari. Inflasi Kota Kupang di bulan Maret 0,16% atau lebih rendah dibanding inflasi di bulan Januari dan Februari 2024, inflasi bulan Maret di Kota Waingapu sebesar 0,52 % lebih rendah dibanding inflasi di bulan Februari. Naiknya tingkat Inflasi di 2 kota rujukan inflasi Kabupaten Sabu Raijua ini banyak dipengaruhi oleh naiknya indeks pengeluaran di kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok penyediaan makanan dan minuman dan kelompok transportasi.

Kenaikan harga komoditi di Kabupaten Sabu Raijua sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor penting yakni **transpotasi laut** karena bergantung pada keadaan cuaca yang menyebabkan sering terganggunya jadwal kedatangan kapal. Selain keadaan cuaca yang mempengaruhi fluktuasi harga kebutuhan pokok, **musim tanam dan musim panen** juga sangat mempengaruhi perubahan harga beberapa jenis kebutuhan pokok seperti beras, bawang merah, cabai rawit.

Di Kabupaten Sabu Raijua sendiri dalam triwulan 1 Januari-Maret 2024, tercatat terjadi kenaikan beberapa barang kebutuhan pokok seperti beras medium, beras premium, bawang merah dan cabai merah keriting, kenaikan bahan kebutuhan pokok ini sangat signifikan dan cukup mengganggu daya beli masyarakat.

Pada umumnya resiko ke depan yang mungkin dihadapi oleh Kabupaten Sabu Raijua adalah terjadinya **kemarau panjang** yang menyebabkan terjadinya gagal tanam dan gagal panen. Risiko berikutnya yakni terjadinya perubahan cuaca secara tiba-tiba yang menyebabkan gelombang tinggi dan menghambat proses distribusi pasokan dari luar Pulau Sabu Raijua, yang akan mengganggu distribusi barang kebutuhan pokok sedangkan permintaan masyarakat semakin meningkat. Dampak ikutan yang disebabkan oleh 2 faktor di atas adalah terjadinya perubahan harga barang kebutuhan pokok yang berfluktuatif.



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam triwulan 1 Januari s/d Maret tahun 2024 pasokan beras dari luar kabupaten Sabu Raijua mengalami hambatan dikarenakan terjadinya kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya produksi padi di daerah – daerah pemasok beras untuk kabupaten Sabu Raijua seperti daerah Sulawesi Selatan. Selain terjadinya kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya produksi beras disentra – sentra produksi, faktor lainnya yakni bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan komoditi beras juga ikut meningkat.

Terbitnya regulasi seperti Peraturan Gubernur NTT no.39 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tataniaga Komoditas Hasil Perikanan menyebabkan para petani tidak bebas lagi mengantarpulaukan rumput laut keluar NTT sehingga menyebabkan kapal-kapal pengangkut beras dari Sulawesi Selatan mengurangi frekwensi pengantarpulauan beras karena mereka tidak dapat lagi membawa pulang hasil rumput laut dari Sabu Raijua.

Untuk menjaga ketersediaan beras dan juga menstabilkan harga kebutuhan pokok, maka pada bulan Januari dan Februari tahun 2024 pemerintah Kabupaten Sabu Raijua gencar melakukan kegiatan operasi pasar sebagai tindakan antisipasi jangka pendek.

Untuk rencana jangka panjangnya, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berupaya untuk melakukan pembukaan lahan baru bagi pertanian sawah sesuai dengan kondisi sumber air, pengembangan komoditi Sorgum dan Jagung sebagai komoditi pangan alternatif, serta melaksanakan diversifikasi pangan khususnya hortikultura melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dengan tujuan agar mengurangi ketergantungan pasokan dari luar Pulau Sabu Raijua.

Selain itu, pemanfaatan BBM Bersubsidi yang belum tepat sasaran menyebabkan biaya produksi yang tinggi dan mempengaruhi harga jual produksi komoditi pangan pada kecamatan yang jauh dari SPBU yang ada di Kabupaten Sabu Raijua.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan perkembangan harga jual komoditi/barang pokok penting di Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan banyak upaya antara lain :

- Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melalui Dinas Pertanian dan Pangan yang mengelola Program dan Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan tidak melaksanakan kerjasama dengan pihak manapun, namun untuk melaksanakan kegiatan diversifikasi serta ketahanan pangan maka dilakukan kerjasama dengan Kelompok Tani secara swakelola.

- Kegiatan Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi melibatkan pihak Kepolisian, Danramil, Kejaksaan, dan Forkopimda lainnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM di Kabupaten Sabu Raijua TA 2024 yang dikoordinir oleh Bagian Perekonomian dan SDA yang bertujuan agar Pemanfaatan BBM Bersubsidi yang tepat sasaran dengan memprioritaskan Petani dan Nelayan dalam mendukung proses pengolahan pangan dan pemeliharaan tanaman untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Suret Keputusan Bupati No.84/KEP/HK/2024

- Melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan dengan Kegiatan Pemanfaatan Tol Laut, dimana Pemerintah Daerah sebagai pengawas bekerja sama dengan *Consignee*/Pelaku Usaha dengan menandatangani Pakta Integritas untuk mengatur muatan dan pemantauan jadwal Tol Laut. Upaya Pemanfaatan Tol Laut ini dilakukan akibat terjadinya pengurangan pasokan beras dari Kapal yang berasal dari Sulawesi Selatan, sehingga Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melakukan upaya lain yaitu dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Tol Laut dengan memprioritaskan bahan kebutuhan pangan. Pada tahun 2024 di bulan Januari -Maret Tol Laut telah mengangkut beberapa Bapokting (komoditi pangan) antara lain Beras Medium, Beras Merah, Gula Pasir Konsumsi/Lokal, Minyak Goreng, Tepung Terigu dan Daging Ayam Ras, dengan komoditi angkutan balik yaitu Garam.

- Penerbitan SK Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Sabu Raijua dan SK Tim Pengendalian dan Pengawasan BBM :

- Surat Keputusan Bupati Nomor: 84/KEP/HK/2024 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM;

- Surat Keputusan Bupati Nomor : 65/KEP/HK/2024 Tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;

- Operasi pasar murah/gerakan pangan murah sebanyak 7 kali yakni pada tanggal 9 Januari, 10 Januari, 11 Januari, 12 Januari dan 13 Januari 2024 dilakukan oleh Dinas Perindag dan tanggal 14 Januari kegiatan Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Pertanian Dan Pangan.

- Sidak Pasar pada tanggal 6 Februari 2024 yang dilakukan langsung oleh Bupati dan Anggota TPID Kabupaten Sabu Raijua serta Forkopimda, pada distributor dan toko-toko yang menyediakan komoditi pangan terutama beras.

- Melaksanakan RAKOR dalam Upaya Pengendalian Inflasi Tahun 2024.

- Pakta integritas *Consignee* antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua dan Pengusaha Pengguna Jasa Tol Laut ( dalam bulan Januari s/d Maret terdapat 14 *Consigne* yang menandatangani Pakta Integritas);

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi di Kabupaten Sabu Raijua pada bulan Januari-Maret Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Kegiatan operasi pasar murah untuk beberapa kebutuhan pokok yang diselenggarakan di semua kecamatan dalam kabupaten Sabu Raijua mampu menekan lonjakan harga beras

dan mampu meminimalisir terjadinya kepanikan masyarakat akibat kenaikan harga beras dan beberapa kebutuhan pokok.

- Kegiatan sidak pasar yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sabu Raijua sangat efektif dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan dan semua pengusaha yang menjadi sasaran sidak berkomitmen untuk bersama – sama dengan pemerintah menjaga pasokan dan stabilitas harga.
- Komunikasi yang efektif melalui saluran Rapat Koordinasi dan zoom meeting, WA Group TPID mampu meningkatkan sinergitas antara lembaga.
- Dukungan dana yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua kepada Instansi – instansi teknis turut memberikan andil yang besar dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Sabu Raijua.

Tahun 2024 terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD Teknis dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di Kabupaten Sabu Raijua, antara lain :

1. Dinas Pertanian dan Pangan mengalokasikan dana untuk intervensi di bidang pengendalian inflasi sebesar **3.106.712.000** dengan melaksanakan beberapa program kegiatan antara lain

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan dengan total anggaran Rp.304.680.800,- yang dirincikan dalam 5 (lima) kegiatan yaitu :
- Kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.859.800
- Kegiatan Pemantauan harga dan pasokan pangan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.449.400
- Kegiatan penyusunan neraca bahan makanan jumlah anggaran Rp.38.239.400
- Kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah jumlah anggaran Rp. 124.992.000
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal jumlah anggaran Rp. 120.000.000
- Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp.55.134.400,- untuk Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dan anggarannya sebesar Rp.16.299.600,-
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan total anggaran Rp.2.215.332.200,- yang dirincikan dalam 3 (tiga) kegiatan antara lain :
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan total anggaran sebesar Rp.375.300.000,-.
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan kegiatan Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian yang dianggarkan sebesar Rp.139.965.000,-.

2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua dengan program kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan jumlah anggaran Rp. 87.285.000

3. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sabu Raijua melaksanakan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Pembentukan Tim Pengawasan dan Distribusi BBM Tingkat Kabupaten Sabu Raijua dan melakukan pengawasan serta pemantauan distribusi BBM Bersubsidi)

dengan anggaran sebesar Rp.68.730.000,-. Dan anggaran untuk kegiatan rapat TPID sebesar Rp. 3.599.000.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah Kabupaten Sabu Raijua

- Peraturan Gubernur NTT no.39 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tataniaga Komoditas Hasil Perikanan menyebabkan para petani tidak bebas lagi mengantarpulaukan rumput laut keluar NTT diharapkan untuk ditinjau kembali.
- Pelaksanaan operasi pasar murah dan sidak pasar
- Rapat Koordinasi dan komunikasi yang intens dengan anggota TPID
- Lakukan peninjauan kerjasama antar daerah yakni dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan guna pemenuhan stok beras
- Peninjauan kembali peraturan tentang sub penyalur BBM bersubsidi yang selama ini telah membantu pemenuhan kebutuhan BBM bagi masyarakat di desa yang kesulitan BBM/melakukan komunikasi dengan BPH Migas agar mencabut kembali pembekuan terhadap Sub Penyalur BBM bersubsidi di Kab. Sabu Raijua.
- Rutin melakukan Rakor/HLM TPID tingkat Provinsi NTT